

2. LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999), Pengertian laporan keuangan adalah:

Bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.

Atau dengan kata lain, laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi dan kemajuan perusahaan dipandang dari sudut keuangan. Laporan keuangan akan menunjukkan sampai seberapa efisien pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan.

Yang dimaksud manajemen perusahaan disini adalah: sekelompok ahli dengan kegiatannya masing-masing bekerja bersama-sama untuk menjalankan perusahaan.

Kalau pengurusan perusahaan dilakukan oleh manajemen, maka pada waktu yang telah ditentukan manajemen ini harus membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban atas pengurusan perusahaan tersebut.

Pada umumnya ada 4 daftar yang diperlukan dalam laporan keuangan, yaitu:

1. *Balance sheet* (neraca)

Menunjukkan posisi keuangan perusahaan, seperti *asset*, *liability*, *stockholder 's equity* pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir tahun.

2. *Income Statement* (laporan laba rugi)

Menunjukkan hasil operasi perusahaan yaitu *revenue*, *expenditure* dan *net profit/loss* pada suatu periode akuntansi tertentu.

3. *Statement of Retained Earnings* (laporan laba ditahan)

Menunjukkan perubahan laba ditahan perusahaan, biasanya yang ditampilkan adalah *profit/loss* dikurangi dengan pembayaran *cash dividend*.

4. *Statement of Cash Flow* (laporan arus kas)

Laporan arus kas menunjukkan informasi mengenai cash inflow dan cash outflow dari kegiatan operasi, keuangan dan investasi selama periode akuntansi tertentu.

Arus kas terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu:

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

- Penerimaan dari pelanggan
- Pembayaran kepada pemasok
- Pembayaran beban operasi
- Kas yang dihasilkan dari operasi
- Pembayaran pajak
- Pembayaran beban bunga
- Penerimaan (pembayaran) lain-lain bersih

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

- Penerimaan dari pencairan (penempatan pada)
 - Deposito berjangka dan sertifikat
 - Deposito tidak lancar bersih
- Bunga yang diterima dari deposito berjangka dan sertifikat deposito tidak lancar
- Hasil penjualan aktiva tetap
- Perolehan aktiva tetap
- Penempatan investasi jangka pendek
- Pembayaran dividen kepada pemegang saham minoritas
- Penambahan penyertaan saham
- Penerimaan dividen

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

- Penerimaan dari hutang bank jangka pendek dan cerukan
- Pembayaran hutang bank jangka pendek dan cerukan
- Penerimaan dari pinjaman jangka panjang
- Pembayaran pinjaman jangka panjang
- Penerimaan dari penerbitan obligasi - bersih
- Pembayaran sewa guna usaha
- Pembayaran pinjaman lain-lain
- Hasil dari (pembayaran untuk) transaksi lindung nilai - bersih

2.1.2. Konsep Pendapatan

Pengeitian pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999) adalah:

Arus bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus itu masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaai ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, ams masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipil, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan dan karena itu merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipil.

Atau dengan kata lain pendapatan / *revenue* adalah: aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva, pelunasan hutang selama periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang / jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

2.1.3. Penandingan Pendapatan Dengan Biaya Yang Dikeluarkan (Matching Revenue And Expired Cost)

Pada tahap awal perkembangan akuntansi, para akuntan berpandangan bahwa laporan keuangan yang utama adalah neraca (*Balance sheet*). Beberapa tahun terakhir ini orang sudah bergeser ke perhitungan rugi-laba, karena pemakai laporan keuangan semakin merasa berkepentingan dengan hasil operasi perusahaan dibandingkan dengan posisi keuangannya.

Dalam penerapan laba bersih secara berkala dua masalah yang terpaut ialah :

1. Pengakuan atas Pendapatan (*recognition of revenue*)

Besarnya pendapatan diukur dengan berapa jumlah yang ditagih dari pelanggan untuk barang maupun jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan tersebut. Masalah yang ditimbulkan dari adanya periodisasi ialah masalah waktu artinya kapan pendapatan itu akan direalisasi. Untuk periode akuntansi tertentu, pertanyaan adalah apakah suatu pendapatan harus diakui dan dilaporkan dalam periode berjalan ataukah harus ditangguhkan ke periode berikutnya.

Ada berbagai kriteria mengenai penentuan kapan suatu pendapatan direalisasi, yang dapat diterima. Dalam berbagai kasus, kriteria yang digunakan hendaknya sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak penjualan dengan pelanggan dan hendaknya sedapat mungkin didasarkan atas bukti yang obyektif. Kriteria yang paling sering digunakan dan diuraikan adalah :

a. Saat Penjualan (*Point of sale*)

Pendapatan dari penjualan barang biasanya dianggap direalisasi pada waktu hak pemilikan berpindah ke pihak pembeli. Pada saat itulah, harga jual telah disepakati, pembeli mendapatkan hak kepemilikan daripada barang tersebut dan penjual mempunyai klaim (tuntutan) yang syah terhadap pembeli. Realisasi pendapatan dari penjualan jasa dapat juga ditentukan dengan cara ini, walaupun sering ada perbedaan waktu antara saat perjanjian disetujui dengan penyelesaian dari jasa tersebut. Sebagai contoh, misalnya dibuat kontrak kerja bahwa akan dilaksanakan suatu jasa reparasi yang didasarkan atas dasar bahan yang dipakai. Harta ataupun ketentuan yang telah disepakati pada saat kontrak ditandatangani belirai

merupakan pendapatan sampai pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Secara teoritis pendapatan dari produksi maupun penjualan barang dan jasa secara teras menerus akan bertambah sesuai dengan usaha yang dilakukan untuk itu. Tetapi dari segi praktisnya, tidak mungkin dibuat suatu penetapan yang obyektif sampai saat kontrak harga disepakati maupun setelah. penjualan melaksanakan apa yang tertuang dalam kontrak itu.

b. Saat penerimaan Pembayaran (*Receipt of Payment*)

Pengakuan pendapatan dapat saja ditangguhkan sampai saat diterimanya pembayaran. Bila digunakan kriteria ini, suatu pendapatan baru dikatakan direalisasi pada saat telah diterima uang kas, tak peduli kapan dilakukan penjualannya. Dasar kas (*cash basis*) ini umum dipraktekkan oleh dokter, ahli hukum dan perusahaan lain yang bergerak dibidang jasa. Memang dari segi teori sedikit kurang dapat dibenarkan, tetapi secara praktis menguntungkan karena sederhana sifatnya dan tak ada masalah untuk menaksir kerugian piutang tak tertagih. Bahwa cara ini diterima sebagai metode yang wajar untuk menentukan waktu serta pengakuan terhadap pendapatan dari jasa perorangan adalah karena pengaruh dari kenyataan bahwa hal ini dapat digunakan untuk menghitung pendapatan yang terkena pajak pendapatan federal. Tapi, kriteria diatas bukan metode yang tepat untuk mengukur pendapatan dari penjualan barang.

c. Metode Angsuran (*Installment method*)

Pada beberapa perusahaan, khususnya dalam bidang perdagangan eceran, umumnya dilakukan penjualan dengan sistem angsuran. Dalam sistem penjualan angsuran, pembeli membayar sejumlah uang muka dan sisanya disepakati akan dibayar dalam jumlah tertentu dalam beberapa kali angsuran. Penjual mungkin tetap menahan hak kepentingan barang-barang tersebut ataupun mengadakan suatu cara tertentu untuk dapat menyita lagi barang tersebut dengan lebih mudah. manakala pembeli gagal membayar angsurannya. Walaupun diberi ketentuan - ketentuan semacam itu, namun penjual secara angsuran hendaknya diperlakukan dengan cara

sama seperti penjualan kredit biasa, dimana pendapatan atau penjualan dianggap telah direalisasi pada saat penjualan.

2. Alokasi Biaya (*Allocation of costs*)

Harga kekayaan maupun jasa yang diperoleh oleh suatu perusahaan umumnya dicatat atas nilai perolehannya. " Nilai Perolehan " (*cost*) adalah jumlah uang kas atau *equivalen* uang kas yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu harta kekayaan atau jasa tertentu. Bila untuk memperoleh suatu harta kekayaan atau jasa tertentu. Bila untuk memperoleh atau membeli suatu harta kekayaan bukan dibayar dengan kas melainkan dengan suatu harta lain, maka nilai harta yang diperoleh itu adalah sebesar *equivalen* uang kas dari harta penukar tersebut. Apabila suatu harta maupun jasa yang diperoleh itu kemudian hari dijual atau dipakai, maka nilai harta tersebut dikurangkan dari pendapatan yang berkaitan untuk menghitung jumlah laba ataupun kerugian bersih. Nilai daripada harta maupun jasa yang diperoleh dan masih ada pada suatu saat tertentu merupakan

suatu aktiva atau harta. Nilai semacam itu dapat juga disebut " biaya yang belum terpakai " (*unexpired cost*). Apabila suatu aktiva dijual atau digunakan, maka lalu menjadi biaya yang telah terpakai " (*expired cost*) " atau " ongkos " (*expenses*). Jadi inilah yang disebut masalah membandingkan (*matching*) pendapatan dengan biaya yang telah terpakai dan angka selisihnya merupakan laba bersih atau kerugian bersih untuk periode tersebut.

(Hyginus Ruswinarto 1986:385)

2.1.4. Beberapa Pengecualian Yang Berhubungan Dengan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan direalisasi pada saat barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat direalisasi pada saat harta yang diterima atau ditangan siap ditukar dengan kas atau klaim atas kas.

Ada beberapa pengecualian yang berhubungan dengan masalah pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Selama Produksi (*During Production*)

Pengakuan pendapatan diperbolehkan sebelum kontrak selesai. Hal ini berkaitan dengan kontrak yang sifatnya jangka panjang. Berarti pendapatan diakui secara periodic berdasarkan prosentase pekerjaan yang telah diselesaikan dan bukan menunggu sampai seluruh pekerjaan selesai.

2. Akhir Produksi (*End Of Production*)

Pendapatan boleh diakui setelah produksi berakhir, meskipun penjualan belum terjadi karena adanya kepastian mengenai harga jual. Contoh: emas, perak, minyak bumi dan hasil pertanian. Untuk barang - barang ini pendapatan boleh diakui meskipun belum terjadi penjualan, karena harganya pasti dan sudah ada pasar yang siap menjualnya.

3. Penerimaan Kas (*Receipt Of Cash*)

Penerimaan adalah dasar lain dari pengakuan pendapatan. Pendekatan dasar kas hanya digunakan apabila tidak memungkinkan untuk menetapkan jumlah pendapatan pada saat penjualan, karena tidak ada kepastian mengenai penagihan piutang. Misalnya untuk penjualan cicilan.

(Standar Akuntansi Keuangan 1999)

2.1.5. Aktiva Tetap

Penyusutan adalah proses alokasi sebagai harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha.

Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional. Contoh pembebanan secara berangsur - angsur, misalnya seperlima dari aktiva tetap dibebankan setiap tahun. Sedangkan secara proporsional, misalnya suatu toko menempati ruangan gedung 25% dari luas bangunan. Dua puluh lima persen (25%) dari penyusutan gedung akan dibebankan pada usaha toko tersebut.

Alokasi biaya aktiva tetap dilakukan dengan membukukannya ke rekening biaya (debit) dan ke rekening akumulasi penyusutan (kredit). Rekening

biaya akan tampak dalam perhitungan rugi laba sedang akumulasi terlihat dalam neraca.

Rekening akumulasi penyusutan merupakan rekening lawan dari rekening aktiva yang bersangkutan. Karena itu, nilai buku aktiva dapat diketahui dengan membandingkan nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan.

Menurut akuntansi ada empat factor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu :

1. Nilai Perolehan Aktiva

Pengeluaran - pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva yang bersangkutan siap dipakai.

2. Nilai Residu

Nilai residu ialah nilai sisa suatu aktiva yang ditaksir pada masa pemakaian aktiva di perusahaan. Nilai sisa suatu aktiva kerap kali tidak signifikan dan dapat diabaikan dalam perhitungan jumlah yang dapat disusutkan. Jika nilai sisa signifikan, nilai tersebut diestimasi pada tanggal perolehan atau pada tanggal dilakukannya revaluasi aktiva (dalam hal ada ketentuan aktiva). Dalam perpajakan nilai residu tidak dipertimbangkan.

3. Dasar Penyusutan

Sifat dan cara penggunaan aktiva dalam kegiatan usaha sangat berpengaruh pada penentuan besarnya biaya penyusutan. Misalnya, mesin atau kendaraan bermotor adalah aktiva yang sifatnya bergerak. Oleh karena itu, cara penyusutannya berbeda dengan penyusutan atas gedung yang bersifat statis.

4. Umur Aktiva

Umur aktiva adalah masa pemakaian aktiva dalam usaha. Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis. Umur ekonomis ialah jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis. Umur ekonomis biasanya lebih pendek dari umur teknis.

(Sophar Lumbantoruan 1996 : 248)

2.1.6. Metode Penyusutan

Menurut literature akuntansi Indonesia ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengalokasikan nilai aktiva tetap ke dalam proses produksi.

Metode penyusutan dapat dilakukan berdasarkan beberapa criteria berikut:

1. Berdasarkan waktu
 - a. Metode Penyusutan Garis Lurus (*straight Hne method*)
 - b. Metode pembebanan yang menurun (penyusutan yang dipercepat) :
 1. Metode jumlah angka waktu (*sum of the year 's digits method*)
 2. Metode saldo menurun / saldo menurun ganda (*declining / double declining method*)
 2. Berdasarkan Penggunaan
 - a. Metode jam jasa (*service hours method*)
 - b. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
 3. Berdasarkan Kriteria Lainnya
 - a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group cmd composite method*)
 - b. Metode Anuitas (*annuity method*)
 - c. Sistem persediaan (*Inventory systetri*)
- (Sopnar Lumbantoruan 1996 : 250)

2.1.7. Metode Penyusutan Yang diperbolehkan Dalam Ketentuan Fiskal

1. Metode Penyusutan Garis Lurus

Dalam perpajakan dijelaskan bahwa metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta. Biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap tahun dengan jumlah yang sama. Rumus penyusutan metode ini adalah :

$$\text{Penyusutan tiap tahun} = \frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur pemakaian}}$$

Contoh:

Usaha Dairi membeli suatu mesin dengan harga Rp 6.000,00. Umur pemakaiannya adalah 4 tahun, sedangkan nilai residunya ditaksir Rp 1.000,00. Dengan demikian, dasar penyusutannya adalah Rp 5.000,00. Karena umurnya 4 tahun maka tarif penyusutannya adalah 25% pertahun.

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan tiap tahun} &= \frac{\text{Rp } 6.000,00 - \text{Rp } 1.000,00}{4} \\ &= \text{Rp } 1.250,00 \end{aligned}$$

Pada tahun kedua nilai mesin :

Nilai perolehan	: Rp 6.000,00
Akumulasi penyusutan 2 tahun	: <u>Rp 2.500,00</u>
Nilai Neto (buku)	: Rp 3.500,00

Metode penyusutan garis lurus adalah salah satu metode penyusutan yang dipakai dalam perpajakan. Hanya, metode ini digunakan terhadap aktiva golongan bangunan. Tarif penyusutan yang berlaku terhadap golongan bangunan adalah 5%, atau umur pemakaiannya 20 tahun. Dasar penyusutan golongan bangunan dalam perpajakan adalah harga perolehannya, taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan. Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan dalam metode ini. Dalam perpajakan metode ini disebut metode saldo menurun.

Contoh:

Dengan data pada contoh pertama ditentukan bahwa tarif pajak adalah 50% per tahun. Dengan demikian penyusutan tiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Buku	Tarif	Penyusutan
1	Rp 6.000,00	50%	Rp 3.000,00
2	Rp 3.000,00	50%	Rp 1.500,00
3	Rp 1.500,00	50%	Rp 750,00
4	Rp 750,00	50%	Rp 375,00
		Jumlah	<u>Rp 5.625,00</u>

3. Metode Satuan Produksi

Penyusutan terhadap beberapa jenis aktiva seperti mesin, kendaraan (truk), lebih sesuai apabila metode satuan produksi yang digunakan. Penyusutan dengan metode ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Unit} = \frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Taksiran jumlah produksi}}$$

Penyusutan setahun = Jumlah produksi setahun $\times$ Penyusutan per unit

Kebaikan metode ini adalah biaya penyusutan langsung dihubungkan dengan pendapatan. Semakin besar produksi, semakin besar pendapatan dan semakin banyak biaya penyusutan.

Contoh :

Misalnya aktiva usaha Dairi berupa truk yang diharapkan dapat dipakai menempuh jarak sejauh 100.000 ktn. Apabila nilai perolehan truk adalah Rp 6.000,00 dan nilai residu Rp 1.000,00 maka biaya penyusutan per km dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 6.000,00 - \text{Rp } 1.000,00}{100.000 \text{ km}} = \text{Rp } 0.05 \text{ per km}$$

Jika pada tahun pertama dan kedua truk menempuh jarak 40.000 km. Dan 20.000 km. Maka penyusutannya masing - masing adalah Rp 2.000,00 dan Rp 1.000,00.

4. Penyusutan Group Dan Gabungan

Untuk mengbindari pekerjaan administrasi yang kecil - kecil, biasanya perusahaan memilih penyusutan dengan mengelompokkan aktiva ke dalam beberapa kelompok (grup). Dalam perpajakan kelompok ini disebut golongan harta. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tariff ke nilai seluruh aktiva yang sejenis. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan grup} = 1 : \text{Taksiran rata - rata umur grup aktiva}$$

Tarif ini diterapkan pada nilai perolehan seluruh grup aktiva. Apabila kelompok aktiva tidak sejenis maka penyusutan dihitung dengan nama *composite depreciation* atau penyusutan gabungan. Penyusutan tiap tahun adalah penyusutan tiap jenis aktiva yang dihitung dengan metode garis.

Contoh:

Usaha Dairi mempunyai 3 truk dengan nilai perolehan Rp 3.000,00, Rp 5.000,00 dan Rp 7.000,00. Nilai residu masing - masing truk Rp 250,00, Rp 500,00 dan 750,00. umur pemakaian semua truk 5 tahun.

Daftar Penyusutan Truk Dengan dasar Penyusutan Grup
Umur Pemakaian 5 Tahun

No Truk	Nilai Perolehan	Nilai Residu	Penyusutan
1	RP 3,000,00	Rp250,00	Rp 2,750,00
2	Rp 5,000,00	Rp500,00	Rp 4,500,00
3	Rp 7,000,00	Rp750,00	Rp 6,250,00
	Rp 15,000,00	Rp 1,500,00	Rp 13,500,00

Tarif penyusutan grup = $1 : 5 = 20\%$

Penyusutan tiap tahun = $20\% \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 3.000,00$

Contoh:

Usaha Dairi mempunyai tiga mesin yang berlainan jenisnya. Nilai perolehan, nilai residu dan umur mesin No. 1; No. 2; serta No 3 masing - masing adalah Rp 4.000,00, Rp 5.00,00, dan 5 tahun: Rp 8.000,00, Rp 300,00, dan 7 tahun : serta Rp 12.000,00, Rp 1.200,00 dan 9 tahun.

Tarif Gabungan

No	Nilai Perolehan	Nilai Residu	Jumlah Penyusutan	Umur Mesin	Penyusutan Tiap Tahun
1	Rp 4,000,00	Rp500,00	Rp 3,500,00	5	Rp700,00
2	Rp 8,000,00	Rp300,00	Rp7,700,00	7	Rp 1,100,00
3	Rp 12,000,00	Rp 1,200,00	Rp 10,800,00	9	Rp 1,200,00
	Rp 24,000,00	Rp 2,000,00	Rp 22,000,00		Rp 3,000,00

Tarif penyusutan gabungan = $\text{Rp } 3.000,00 : \text{Rp } 24.000,00 = 12,5\%$

Biaya penyusutan tiap tahun dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan saldo rekening aktiva.

Dalam prosedur penyusutan ini tidak ada rekening akumulasi penyusutan untuk tiap aktiva. Jika suatu aktiva ditarik pemakaiannya, nilai aktiva yang bersangkutan dihapus dari rekening aktiva dan selisih antara nilai tersebut dengan hasil yang diterima dimasukkan ke akumulasi penyusutan.

(Sophar Lumbatoruan 1996 : 256)

2.1.8. Aktiva

Aktiva ada 2 macam :

1. Aktiva Lanear (*current asset*)

Adalah kas dan aktiva lain yang diharapkan dapat ditukar dengan ke kas, dijual atau dipakai dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Atau aktiva digolongkan dalam aktiva lancar bila aktiva itu digunakan untuk membayar kewajiban lancar (*current liabilities*) dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama.

Aktiva lancar disajikan dalam neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya (*liquidity*). Contoh akun dalam aktiva lancar: kas, investasi jangka pendek (*marketable securities*), piutang, inventory dan biaya dibayar dimuka.

Investasi dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau tidak lancar tergantung dari maksud manajemen (*management intent*) pada waktu investasi terjadi.

a. Kas (*casfi*)

Dana dibatasi penggunaannya (*restricted funds*) tidak termasuk dalam akun kas, tetapi disajikan dalam " catatan atas laporan keuangan "

b. Investasi Jangka Pendek (*short term investment*)

c. Piutang (*Receivables*)

Jumlah, sifat jumlah yang ditangguhkan dan kerugian yang diantisipasi karena piutang tidak tertagih harus dijelaskan.

d. Persediaan (*Inventory*)

Informasi tentang dasar penilaian persediaan (*lower of cost or market*) dan metode penilaian persediaan (*LIFO* atau *FIFO*) harus disertakan dalam neraca.

e. Biaya dibayar dimuka (*Prepaymenf*)

Ini adalah biaya yang dikeluarkan sekarang untuk keuntunganyang diterima atau didapat di masa yang akan datang. Contoh: *prepaid insurmce*, *prepaid rent*.

2. Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Contoh : Hak patent, copyrights, trademark, goodwill, franchise, dan lain -lain dan disusutkan selama 5-40 tahun.

3. Aktiva Lainnya (*other assets*)

Contoh: *deferred charges* (dibayar dimuka untuk jangka panjang), piutang tidak lancar (*noncurrent receivables*) dan advance to subsidiaries (persekot).

4. Investasi Jangka Panjang (*long term investment*)

Beberapa contoh investasi jangka panjang adalah :

- a. Investasi dalam bentuk sekuritas (obligasi saham)
- b. Investasi di aktiva tetap berwujud (*tangible fixed asset*), tetapi aktiva tetap tidak digunakan dalam operasi sehari - hari.
- c. Investasi untuk tujuan tertentu (dana pensiun)
- d. Investasi di anak perusahaan (*subsidiaries*)

5. *Property, Plant, And Equipment (PP&E)*

Termasuk dalam kategori PP&E adalah: tanah, bangunan, mesin dan peralatan, capital lease, dll. Kecuali tanah semua yang diakui ini disusutkan.

2.1.9. Earnings Management

Menurut Sugiri yang dikutip oleh widyaningdyah, membagi definisi earnings management dalam dua definisi, yaitu :

a. Definisi Sempit

Bahwa earnings management hanya berkaitan dengan pemilihan pemilihan metode akuntansi. Selain itu juga diartikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

b. Definisi Luas

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi laba) yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

2.1.10. Praktek - Praktek Yang Dapat Dilakukan Manajer Untuk Mengatur Earnings

Menurut Ayres dikutip dalam Gumanti (2000), ada tiga factor yang dapat dilakukan manajer:

a. *Majemen Akrua (accruals managemen)*

Hal ini sering dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretiori*). Dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan (*revenues*), menganggap sebagai beban biaya atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya (*amortizeor capitalize ofan investment*) misalnya biaya perawatan aktiva, dan perkiraan-perkiraan akuntansi lainnya seperti misalnya beban piutang ragu - ragu, dan pembahan - perabahan akuntansi.

b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib (*adoption of mandatory accountuing changes*). Hal ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara penerapan lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menunda sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

c. Perubahan akuntansi secara sukarela yang berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*generally accepted accounting principles = GAAP*). Walaupun manajer tidak dapat melakukan perubahan metode akuntansi secara sering, mereka dapat melakukan perubahan metode akuntansi secara sering, mereka dapat melakukan dengan bentuk-bentuk perubahan akuntansi lain yang berbeda baik secara individu maupun bersama-sama untuk beberapa periode.

2.1.11. *Non Discretionary accrual*

Hal ini berkaitan dengan metode kebijakan akuntansi dimana ada kebebasan bagi perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansi sepanjang tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan. Pemilihan metode kebijakan akuntansi dapat berupa metode penyusutan aktiva maupun metode penilaian persediaan.

Saat pengakuan pendapatan dan pengeluaran, karena perusahaan dapat secara bebas menentukan kapan mereka mengakui pendapatan (revenue) dan suatu pengeluaran (expense).

Contoh - contoh *non discretionary accrual*:

1. Pada akhir tahun buku perusahaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya.
2. Rekayasa menaikkan akrual (laba) antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan, misalnya perusahaan mencatat pengiriman barang pesanan sebagai penjualan (sekali pun sebenarnya dalam perjanjian, biaya angkut menjadi tanggungan penjual, yang berarti sebenarnya, menurut prinsip akrual, sebelum pesanan tersebut sampai ke tangan konsumen, pengiriman pesanan tersebut belum dapat diakui sebagai laba).
3. Satu fakta yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda, mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus atau saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir (laba) yang sedikit berbeda.
4. Perusahaan menunda pelaporan biaya - biaya tertentu untuk mendapatkan laba yang lebih besar / kecil. Biaya - biaya itu antara lain :
 - a. Biaya penelitian dan pengembangan (*research & Development cost*)
 - b. Biaya perawatan mesin dan peralatan (*repair & maintenance cost*)
 - c. Biaya pemasaran dan iklan (*marketing & advertising expenses*)

Oleh karena itu para pengguna laporan keuangan harus seksama memperhatikan dampak dari kebijakan perusahaan ini, misalnya dengan usaha untuk melakukan perbandingan dengan industri sejenis.

Serupa dengan model Jones (1991), penelitian menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan yang diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya untuk memproksi tingkat akrual yang normal (*non discretionary accrual*). Total aktiva tahun sebelumnya digunakan sebagai pembagi untuk mengurangi tingkat heteroskedastisitas (Jones, 1991). Jones menemukan bahwa kuadrat residual dari

model ekspektasi yang tidak diskala dengan total aktiva berkorelasi kuat dengan kuadrat aktiva tahun sebelumnya. Hal ini berarti NDA it tahun ini dengan NDA it tahun lalu berbeda (heterokendastisitas) untuk mengurangi perbedaan aktiva tersebut maka dipakai total aktiva tahun sebelumnya.

2.1.12. *Discretionary Accrual*

Discretionary Accrual adalah bagaimana cara perusahaan dalam mengelola pengeluaran - pengeluaran yang akan memberikan manfaat di masa depan yang menyimpang dari standar akuntansi Indonesia.

Contoh dalam praktek yang dilakukan oleh perusahaan adalah:

1. Mempeipanjang masa manfaat aktiva tetap yang sudah habis
Masa manfaat dari suatu aktiva tetap yang sudah habis, tetap disusutkan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Menggunakan tarif pada kelompok aktiva yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2.1.13. **Perbedaan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan**

Pada tahun 2000, telah dipublikasikan Peraturan Perpajakan yang baru, UU No. 17 tahun 2000, tentang pajak penghasilan untufc menggantikan UU No. 10 tahun 1994. Salah satu perubahan yang mencolok adalah perubahan tarif pajak penghasilan dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perbedaan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan
MenurutUUNo. 7/1983 danIJUNo. 10/1994

Menurut UU No. 10 / 1994		Menurut UU No. 17 / 2000	
Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
$PKP \leq 25.000.000$	10%	$PKP \leq 50.000.000$	10%
$25.000.000 < PKP \leq 50.000.000$	15%	$50.000.000 < PKP \leq 100.000.000$	15%
$50.000.000 < PKP$	30%	$100.000.000 < PKP$	30%

Peraturan perpajakan yang baru tersebut efektif berlaku per 1 januari 2001. Jadi, seandainya laba perusahaan per 31 Desember 2000 lebih besar dari Rp 25.000.000

dan lebih kecil dari Rp 50.000.000 maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 5% dari besarnya laba yang ditunda pengakuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Penghematan Pajak Yang Dapat Dinikmati Oleh Perusahaan Seandainya Mereka Memiliki Kesempatan Untuk Menunda Pelaporan Laba

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Lama	Tarif baru	Tax Saving
$PKP \leq 25.000.000$	10%	10%	0 %
$25.000.000 < PKP \leq 50.000.000$	15%	10%	5 %
$50.000.000 < PKP \leq 100.000.000$	30%	15%	15%
$100.000.000 < PKP$	30%	30%	0 %

* Tax Saving seandainya perusahaan menunda pelaporan pajak satu periode

Perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2000 sehingga laba 2000 menjadi lebih rendah. Laba yang ditunda pelaporannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2001. Dengan cara ini, perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda.

2.1.14. Apakah Benar Satu Tahun Sebelum Penerapan Perpajakan Yang Baru, Perusahaan Menurunkan Akrua Untuk Menunda Pembayaran Pajak

Guna menjawab hipotesis tersebut diperlukan informasi mengenai tingkat Discretionary accrual tahun 2000 dan tahun 2001.

Penundaan laba dapat dilihat dengan adanya discretionary accrual yang negatif pada tahun 2000 dan discretionary accrual yang positif pada tahun 2001.

Langkah. - langkah yang dilakukan:

1. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Perhitungan tingkat akrual yang tidak normal meliputi tahapan - tahapan sebagai berikut:
 - a. Menghitung total akrual

- b. Menentukan tingkat akrual yang normal. Penulis menggunakan model estimasi akrual normal yang dikembangkan oleh Jones (1991), sebagai proksi tingkat akrual yang normal.
 - c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal.
2. Menguji hipotesis penelitian. Apakah benar, penurunan tarif pajak memotivasi perusahaan untuk menunda laba (menurunkan akrual) pada satu periode sebelum tarif baru berlaku.

Menghitung tingkat akrual yang normal. Menghitung tingkat akrual yang normal diawali dengan perhitungan total akrual.

Menghitung total akrual, total akrual didapat dengan rumus sebagai berikut (Sook,1998):

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dengan:

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow from operation*) perusahaan i pada tahun t

Seperti Jones (1991), penelitian ini memfokuskan pada *discretionary accrual* sebagai ukuran manajemen laba. Total akrual sebuah perusahaan i dipisahkan menjadi *non discretionary accrual* (tingkat akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat akrual yang abnormal). Tingkat akrual yang abnormal ini merupakan tingkat akrual hasil rekayasa laba oleh manajer.

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dengan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Non discretionary* akrual perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary* akrual perusahaan i pada tahun t

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proksi tingkat akrual yang wajar atau normal (DA_{it}), yang dikembangkan oleh Jones (1991). Model estimasi akrual Jones yang akan digunakan untuk memisahkan *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual* adalah:

$$TA_{it} / A_{it-4} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (AREV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \alpha_4 \dots \dots \dots (3)$$

TA it	= Total akrual perusahaan i pada tahun t
$\Delta\text{REV it}$	= Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t – 1
PPE it	= Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
A it – 1	= Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1
ε_{it}	= Error term perusahaan i pada tahun t

Perubahan pendapatan $\beta_1(\Delta\text{REV it}/A_{it-1})$ dimasukkan kedalam model estimasi tersebut untuk mengendalikan perubahan dalam *nondiscretionary accruals* yang disebabkan oleh perubahan kondisi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran objektif dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer (Jones 1991,211). Sedangkan β_2 (PPE it/Ait-1) merupakan bagian dari total akrual yang berhubungan dengan biaya depresiasi yang *nondiscretionary*.

Ordinary teast square digunakan untuk mendapatkan nilai a_1, b_1 dan b_2 sebagai estimasi parameter α_1, β_1 dan β_2 .

Menghitung tingkat akrual yang tidak normal. Sebagaimana disajikan dalam rumus (2), total akrual pada dasarnya mencakup akrual normal dan akrual yang abnormal. Jadi, tingkat akrual yang abnormal ini (yang merupakan proksi akrual rekayasa laba oleh manajer) dapat dihitung dengan rumus :

$$DA_{it} = NDA_{it} + TA_{it} \dots\dots\dots (4)$$

TA it	= Total akrual perusahaan i pada tahun t
NDA it	= <i>Non discretionary</i> akrual perusahaan i pada tahun t
DA it	= <i>Discretionary</i> akrual perusahaan i pada tahun t

Jadi besarnya tingkat discretionary (tingkat akrual hasil rekayasa laba) yang dihitung dengan model estimasi Jones dapat dirumuskan sebagai berikut ;

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1(\Delta\text{REV it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it}/A_{it-1})] \dots\dots\dots (5)$$

DA it = *discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

Tanpa manajemen laba, maka total akrual perusahaan I tahun t, TA it akan dapat dijelaskan oleh perubahan kondisi perusahaan atau dengan kata lain, tanpa manajemen laba, TA it = NDA it atau tanpa manajemen laba, maka besarnya DA it = nol. Jadi, nilai *discretionary accrual* DA it mengindikasikan tingkat akrual

hasil manajemen laba. Rekayasa menaikkan laba diindikasikan dengan nilai DA it yang positif. Rekayasa menurunkan laba diindikasikan dengan nilai DA it yang negatif.

Ada dua analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, apakah benar, penurunan tarif pajak memotivasi perusahaan untuk menunda laba (menurunkan akrual) pada satu periode sebelum tarif baru berlaku.

1. Hipotesis pertama akan diuji dengan nilai t tingkat akrual yang tidak normal selama masa pengamatan (2000 - 2002). Apakah tingkat akrual yang tidak normal tersebut benar-benar berbeda dari nol. Jika benar, perusahaan menunda pelaporan laba sebelum tarif baru berlaku dan menggeser laba tersebut ke periode berlakunya tarif baru, maka nilai 1 tingkat akrual abnormal 2000 akan bernilai negatif dan nilai t tingkat akrual abnormal tahun 2001 akan bernilai positif.
2. Hipotesis kedua akan diuji dengan membandingkan tingkat akrual yang tidak normal satu tahun sebelum tarif baru berlaku (tahun 2000) dan tahun pertama mulai berlakunya tarif baru (tahun 2001). Penulis menggunakan uji parametrik t-test berpasangan dan uji non parametrik, uji Wilcoxon berpasangan. Jika benar, perusahaan menunda pelaporan laba sebelum tariff baru berlaku dan menunda pengakuan laba satu periode kedepan maka uji t - test dan Wilcoxon akan mengindikasikan bahwa tingkat akrual abnormal tahun 2000 lebih rendah dari tingkat akrual abnormal 2001.

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar perusahaan (Scott, 1997, 304; Setiawati dan Na'im, 2000, 428). Di US banyak studi empiris yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan, yang dikenal dengan nama TRA (Tax Reform Act), untuk mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Dhaliwa, Frankel dan Trezevant, 1994; Gunther, 1994; Frankel dan Trezevant, 1994; Cloyd, Pratt dan Stock, 1996; Maydew, 1997).

Guenther (1994) mencoba mengevaluasi perilaku publikasi TRA terhadap perusahaan di US. Seperti banyak penelitian manajemen laba lainnya (Healy, 1985; Jones 1991) Guenther memfokuskan pada total akrual. Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak. Kegagalan Guenther untuk membuktikan bahwa penurunan pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan ini mungkin disebabkan guenther tidak memperhitungkan keterbatasan manajer untuk memanipulasi akrual.

Berbeda dengan Guenther yang mengevaluasi total akrual, Frankel dan Trezevant (1994) memfokuskan pada satu keputusan operasional, yaitu keputusan pembelian persediaan pada akhir tahun untuk melihat ada tidaknya manajemen laba. Dalam kondisi perekonomian yang normal, harga barang cenderung naik. Bagi perusahaan yang menggunakan asumsi aliran persediaan LIFO, pembelian persediaan ekstra pada akhir tahun akan menghasilkan angka harga pokok penjualan yang tinggi dan selanjutnya akan menurunkan laba. Semakin rendah laba, semakin rendah pajak yang harus dibayarkan. Jika manajer memperhitungkan pajak sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, maka reduksi pajak pada tahun 1987 di US akan memicu manajer perusahaan yang menerapkan asumsi aliran persediaan LIFO untuk menunda pengakuan laba dengan cara melakukan pembelian persediaan ekstra pada tahun 1986. Dengan sample sebanyak 274 perusahaan LIFO dan 296 perusahaan FIFO, Frankel dan Treservant membuktikan bahwa manajer perusahaan yang menerapkan asumsi aliran persediaan LIFO, melakukan pembelian persediaan ekstra akhir periode sebelum berlakunya TRA.

Secara umum, para peneliti tersebut (kecuali Guenther) menemukan fakta bahwa manajer terdorong untuk meminimalkan pajak. Yang menarik adalah hasil penelitian Cloyd, Pratt dan Stock (1996). Mereka menggunakan koefisien untuk mengevaluasi seberapa jauh pertimbangan pajak mempengaruhi keputusan akuntansi para manajer. Mereka menemukan fakta bahwa manajer perusahaan yang tidak *go public* relatif lebih berminat dibandingkan dengan manajer perusahaan yang *go public* untuk memilih kebijakan akuntansi yang agresif (dalam rangka meminimalkan pajak). Mereka menduga, hal ini disebabkan karena

perusahaan publik menghadapi biaya non pajak yang relatif lebih besar jika melaporkan laba yang rendah, dibandingkan perusahaan yang tidak *go publik*. Laba yang rendah mempertinggi probabilitas pelanggaran *debt covenant*, mengurangi probabilitas kompensasi manajer yang didasarkan atas laba dan laba yang rendah sering diartikan sebagai rendahnya nilai (*value*) perusahaan. Berikutnya, sekalipun penghematan pajak merupakan satu dasar pertimbangan, manajer baik manajer perusahaan *pubtik* maupun perusahaan yang tidak *go publik* tetap memilih kebijakan akuntansi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (penelitian menyebut hal ini dengan *conformity*).

Menurut Jones (1991) Temuan yang disajikan dalam tulisan terdahulu tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk raendapatkan penghematan pajak. Rata - rata tingkat akrual yang abnormal tahun 1994 negatif, tetapi tidak signifikan. Namun, rata - rata tingkat akrual yang abnormal pada tahun 1995 terbukti positif dan signifikan. Selain itu, uji beda dua rata-rata t-test dan uji Wilcoxon juga mengidentifikasi bahwa tingkat akrual yang tidak normal pada tahun 1994 lebih rendah dari tingkat akrual yang tidak normal pada tahun 1995.

Namun sekalipun tingkat akrual yang abnormal tahun 1995 terbukti positif dan signifikan, serta tingkat akrual abnormal tahun 1995 terbukti lebih tinggi dari tingkat akrual abnormal tahun 1994, fakta yang ada tidak dapat membuktikan bahwa tingkat akrual tahun 1994 (satu periode sebelum berlakunya peraturan perpajakan yang baru) lebih rendah dari nol. Fakta yaiig ada tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya perilaku penurunan laba pada tahun 1994.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian terdahulu adalah Undang - undang No 10 tahun 1994, tentang pajak penghasilan, baru disahkan per 9 November 1994. Undang - undang tersebut efektif diberlakukan per 1 Januari 1995. Isu mengenai penurunan tarif pajak penghasilan baru beredar sekitar bulan September 1994. Rentang waktu antara pengesahan Undang - undang Perpajakan yang baru dengan akhir periode pelaporan hanya 50 hari. Jadi, perusahaan hanya memiliki kesempatan selama 50 hari, jika mereka akan merencanakan dan melakukan aktivitas untuk menunda laba, seperti misalnya mempercepat

pembelian aktiva. Beberapa metode rekayasa penurunan laba barangkali membutuhkan waktu lebih dari 50 hari.

Hal berikutnya, perusahaan tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih kebijakan akuntansi guna menurunkan laba. Pemilihan kebijakan akuntansi, terutama kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan fiskal, sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perpajakan. Sebagai contoh, dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya diijinkan untuk menggunakan metode Rata - rata dan LEFO dalam menilai persediaan. Jadi, keterbatasan kebijakan yang dapat dipilih barangkali mengakibatkan tidak banyak perusahaan yang dapat memanfaatkan moment penurunan tarif pajak untuk meminimalkan pajak yang mesti dibayar.

Keterbatasan terakhir yang barangkali mengganggu hasil penelitian ini adalah, dari total 107 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994, hanya mendapatkan data laporan keuangan 47 perusahaan.

2.3. Menguji Hipotesis Penelitian

Ada dua analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, apakah benar, penurunan tarif pajak memotivasi perusahaan untuk menunda laba (menurunkan akrual) pada satu periode sebelum tarif baru berlaku.

1. Hipotesis pertama akan diuji dengan melihat nilai t tingkat akrual yang tidak normal selama masa pengamatan (2000-2002). Apakah tingkat akrual yang tidak normal tersebut benar-benar berbeda dari nol. Jika benar, perusahaan menunda pelaporan laba sebelum tarif baru berlaku, maka nilai t tingkat akrual abnormal tahun 2000 akan bernilai negatif dan nilai t tingkat akrual abnormal tahun 2001 akan bernilai positif.
2. Hipotesis kedua akan diuji dengan membandingkan tingkat akrual yang tidak normal satu tahun sebelum tarif baru berlaku (tahun 2000) dan tahun pertama mulai berlakunya tarif baru (tahun 2001). Penulis menggunakan uji parametrik t - test dan Wilcoxon berpasangan. Jika benar, perusahaan menunda pelaporan laba sebelum tarif baru berlaku, dan menunda pengakuan laba satu periode kedepan, maka uji t - test dan Wilcoxon akan mengindikasikan bahwa tingkat

akrual abnormal tahun 2000 lebih rendah dari tingkat akrual abnormal tahun 2001.